PENGARUH AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(Survey Pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Dianne Natalia Christanti
Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia

Abstract:*A qualified financial statements have to measure four normative. Since 2010, a new rule was made on accrual-based accounting for governments. It supposed to be a basic reason to make a financial statements as qualified as the HR management. Besides, internal control system is an important activity to present a qualified financial statements. This study aims to see an overview of accrual accounting, internal control systems, financial reporting quality and the influence both simultaneous and partial in West Java Provincial Government. The method used are description and verification. This study used 33 respondents in the financial bureau in West Java Provincial Government. Statistical testing was done to see the correlation by using multiple regression analysis and coefficient of determination to analyse data. Data were processed by using SPSS15 application. The results showed that the accrual-based accounting, internal control system,and financial reporting quality were in good condition yet several indicators in a state sufficient. Moreover, those indicators systems have a significant influence on the quality of financial statements, both simultaneously and partially. It indicated that when the West Java Provincial Government has optimally implemented both the accrual-based accounting and internal control systems, the financial would be more qualified as well.*
Keywords : accrual based accounting, Intenal Contol System, Quality Of Financial Statment

I. PENDAHULUAN

Salah satu wujud dari keberhasilan pemerintah yaitu dengan mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas, LKPD dianggap baik jika mendapat opini wajar tanpa pengucualian, sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban telah berakhirya tahun anggaran dan wajib diaudit oleh BPK(Ketut,2009).

Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat, sejak tahun buku 2008 belum ada satu pemerintah daerah pun yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bahkan jumlah daerah yang tidak diberikan pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau *disclsimer* justru bertambah, terakhir yang mendapat opini WTP adalah Laporan keuangan Kota Banjar pada Tahun 2007, predikat *disclaimer* pada 2008 adalah Pemkab Bandung Barat, Pemkab Cianjur dan Pemkab Karawang, pada Tahun 2009 laporan Keuangan Pemkab Bandung Barat dan Pemkab Cianjur masih *disclaimer*, ditambah Pemkot Bandung dan Pemkot Bekasi, Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena BPK mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan, rendahnya kulitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintah, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang belum memadai dan kurang ditaatinya ketentuan perundangan, dari pemeriksaan BPK, banyak temuan berulang dari tahun ke tahun, tanpa ada keterangan bahwa temuan itu sudah ditindak lanjuti oleh pemda, temuan BPK juga menunjukkan sebagian besar laporan keuangan pemda mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bermasalah pada pencatatan aset/barang milik daerah, umumnya hal itu terjadi karena pencatatan, keberadaan fisik dan pengungkapannya dalam laporan belum memadai, adanya sejumlah peraturan yang bertabrakan menjadi salah satu penyebab buruknya kualitas laporan pemda, sehingga PEMDA menjadi bingung harus berkiblat

kemana, apakah ke Kementerian Dalam Negeri atau ke Kementerian Keuangan, sebenarnya masalah tersebut bisa diatasi jika pemda memiliki komitmen kuat dan konsisten melakukan pembenahan, sistem harus dibangun sedemikian rupa disertai reward dan punishment yang jelas, untuk mendorong ketertiban pengelolaan laporan, pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola laporan keuangan, peningkatan kualitas SDM khususnya lulusan akuntansi sangat diperlukan agar dapat mengahasilkan laporan keuangan pemda yang ideal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(Tahria Syfrudin,2011).

Pemerintah diduga telah melanggar ketentuan UU Keuangan Negara untuk menerapkan standar akuntansi berbasis akrual dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual, demikian laporan dari BPK kepada DPR, padahal sesuai ketentuan UU Keuangan Negara nomor 17/2003, pemerintah harus mampu menerapkan hal ini paling lambat 5 tahun sejak UU tersebut diberlakukan, tapi laporan dari ketua BPK kepada DPR mengatakan bahwa pemerintah belum menjalankan penerapan standar akuntansi berbasis akrual hingga tahun 2011, yang notabene merupakan tahun kedelapan untuk pelaksanaan UU tersebut, kita sudah melewati batas waktu dalam UU, namun pemerintah masih belum menerapkan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual, dalam mendorong pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tanpa mengabaikan kemampuan pemerintah di pusat dan daerah, kesiapan SDM dan teknologi agar dipertimbangkan secara seksama, sehingga nantinya penerapan tersebut tidak menurunkan pencapaian opini atas kewajaran laporan keuangan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan perlakuan penyusutan aset tetap sehingga dapat disajikan sebesar nilai buku, penerapan SAP berbasis akrual juga perlu dipertimbangkan perlakuan penyusutan terhadap aset tetap sehingga dapat disajikan sebesar nilai buku, hal ini diyakini akan meningkatkan keandalan laporan keuangan pemerintah (Hadi Poernomo, 2012).

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat memandang kelemahan sistem pengendalian internal merupakan penyebab utama dari permasalahan yang muncul dalam temuan BPK RI pada pelaksanaan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, oleh karena itu perlu adanya perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pemprov Jabar melalui diagnostic bassesment terhadap SPI sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, sementara itu, Banggar juga memberikan sejumlah catatan terkait masalah aset yang dimiliki Pemprov Jabar. dalam hal ini, Bangar meminta Pemprov Jabar segera melakukan penataan dan penyelamatan aset, khususnya terhadap asset tidak bergerak (tanah dan bangunan) melalui inventarisasi, sertifikasi dan penguasaan fisik (Aceng Roni Syahbana,2010).

Pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing, salah satu alasan mengapa BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) antara lain karena belum memadainya SPIP serta belum adanya SPIP yang melembaga (Isye,2012).

Dikarenakan uraian diatas penulis beranggapan perlu untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian “Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas, maka pembahasan masalah ini akan dibatasi pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.
2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi di Jawa Barat.

Keterangan : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat sampi saat ini baru menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

II. KAJIAN TEORI KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Ada beberapa definisi akuntansi berbasis akrual, yaitu :

Menurut Nunuy (2007:17) :

> "Akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas".

Menurut SAP berbasis akrual dalam Abdul (2012:24) menjelaskan tentang kerangka konseptual dari pengakuan unsur laporan keuangan, yaitu :

" a. Pengakuan pendapatan
   1. Pendapatan (LO) diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
   2. Pendapatan (LRA) diakui pada saat kas diterima direkening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan.

   b. Pengakuan beban dan belanja
   1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
   2. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas negara atau daerah atau entitas pelaporan.

Kerangka konseptual dari pengukuran (nilai perolehan historis) unsur laporan keuangan, yaitu :

a. Aset
   Dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
b. Kewajiban
   Dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan".

Sistem pengendalian intern

Ada beberapa pengertian tentang sistem pengendalian intern yaitu :

Menurut Permendagri no 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, yaitu:

> "Sistem Pengendalian Intern adalah proses yangintegral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatanyang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan"**.**

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian SPI yang diterapkan dipemerintah menurut PERMENDAGRI no 60 tahun 2008 terdiri atas unsur:

" a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1) Penegakan integritas dan nilai etika;
   Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
   a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
   b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah;
   c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
   d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
   e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2) Komitmen terhadap kompetensi;
   Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
   a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
   b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam InstansiPemerintah;
   c. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
   d. memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuamanajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.

3) Kepemimpinan yang kondusif;
   Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:
   a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
   b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;
   c. mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
   d. melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
   e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah;
   f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
   a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
   b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah;
   c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
   d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
   e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan

   Penyusunan struktur organisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
b. pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
c. pegawai yang diberi wewenang dan memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.

6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sekurangkurangnya hal-hal sebagai berikut:
a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen;
c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia berpedoman pada peraturan perundangundangan.

7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian risiko
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas:
1) identifikasi risiko;
Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:
a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal;
c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko
2) analisis risiko.
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima

c. Kegiatan pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajibmenyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas

dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis;
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Kegiatan pengendalian terdiri atas:

1) reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
2) pembinaan sumber daya manusia;
3) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
4) pengendalian fisik atas aset;
5) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
6) pemisahan fungsi;
7) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
8) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
9) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
10) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya;
11) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi,mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

1) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
2) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

e. Pemantauan pengendalian intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya ".

Kualitas laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oelh laporan keuangan. (PP No.24 tahun 2005 tentang SAP)

Keempat karakteristik ini merupakan syarat dapat dikatakan berkualitas, yaitu :

" 1. Relevan, jika informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi dimasa lalu.

Informasi yang relevan yaitu :

a. Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
b. Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dasa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
d. Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal, jika informasi dalam laporan keuanagn bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
   Informasi yang andal memenuhi karakteristik :
   a. Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihaka yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan dan tidak berbeda jauh.
   c. Netralitas
3. Dapat dibandingkan, jika informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuanagn entitas pelaporan lain pada umumnya.
   a. Perbandingan secara intenal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam 1 tahun.
   b. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas).
4. Dapat dipahami, jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna “.

Kerangka pemikiran

Penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan pusat maupun daerah di Indonesia adalah hal yang baru. Akuntansi berbasis akrual ini baru saja dikeluarkan peraturannya melalui SAP berbasis akrual. Yang dulunya diatur dalam PP no.24 tahun 2005, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah sehingga dikaji ulang dalam PP no.71 tahun 2010. SAP berbasis akrual ini dibuat dengan tujuan agar informasi yang tersaji dalam l aporan keuangan bisa lebih akurat, relevan dan dapat lebih transparan. Sehingga dianggap lebih dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. untuk memenuhi sebuah laporan keunagan yang berkualitas juga dibutuhkan komponen lain, salah satunya yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), ada 5 unsur dari SPIP sendiri yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Lima unsur ini saling terjalin erat satu dengan yang lainnya dan diharapkan dapat mengkontrol setiap peristiwa yang terjadi dipemerintahan, khususnya pemerintah daerah. Dengan adanya SPIP ini juga diharapkan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBD) sehingga laporan keuangan yang disusun dapat berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hubungan Akuntansi Berbasis Akrual Dan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) :

> “Akuntansi berbasis akrual menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan. Menyajikan informasi keuangan secara lebih akurat dan lengkap sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas”.

Hubungan Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa:

> “Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas

laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : Sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

: Akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

III. Objek dan metode penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian intern (SPI) dan kualitas laporan keuangan.

Tabel 3.1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode Yang Digunakan**	**Unit Analisis**	**Time Horizon**
T – 1	Descriptive dan Verifikatif	Decriptive dan Survey	Akuntansi berbasis akrual	Cross sectional
T – 2	Descriptive dan Verifikatif	Decriptive dan Survey	Sistem Pengendalian Intern	Cross sectional
T – 3	Descriptive dan Verifikatif	Descriptive dan Survey	Kualitas laporan keuangan	Cross sectional

Sumber: (Umi Narimawati:2010)

Tabel 3.2
Operasional variabel

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntansi berbasis akrual	Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya padasaat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (bukan hanya pada saat kas yang diterima atau dibayar). Abdul (2007:49)	1. Pengakuan 2. pencatatatan 3. pengukuran	1. Pendapatan 2. Belanja 3. Beban 1. Kewajiban 2. Aset Pengukuran dilakukan dengan nilai perolehan historis	Ordinal

		Abdul (2012:24)		
Sistem pengendalian internal	Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP. No.60 tahun 2008)	1. Lingkungan pengendalian	1. Penegakan Integritas Nilai Etika 2. Komitmen terhadap Kompetensi 3. Kepemimpinan yang Kondusif 4. Memiliki Struktur Organisasi 5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM 7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif 8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Ordinal
		1. Penilaian Resiko	1. Identifikasi Resiko 2. Analisis resiko	
		2. Aktivitas pengendalian	1. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan 2. Pembinan SDM 3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 4. Pengendalian fisik atas asset 5. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja 6. Pemisahan fungsi 7. Otorisasi atas transaksi dan	

			kejadian yang penting 8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian 9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya 10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting	
		3. Informasi dan komunikasi	Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus	
		4. Pemantauan (PP. No.60 tahun 2008)	Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern	
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas laporan keuangan adalah karakteristik kualitatif yang dimiliki oelh laporan keuangan. (PP No.24 tahun 2005 tentang SAP)	1. Relevan	a. Memiliki umpan balik b. Memiliki manfaat prediktif c. Tepat waktu d. Lengkap	Ordinal
		2. Andal	a. Penyajian jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralitas	
		3. Dapat dibandingkan	Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal	
		4. Dapat dipahami (PP No.24 tahun	Batas pemahaman para Pengguna	

		2005 tentang SAP)		

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

a. Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak- pihak yang terkait langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi auditor, kualitas audit dan pemberian opini audit *going concern*.

b. Kuesioner, teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah disusun berdasarkan operasionalisasi variabel untuk masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya kuesioner yang telah disusun, diberikan kepada responden yang telah ditentukan sebagai sumber data dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku-buku (*text book*), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.

1. Analisis Kualitatif

Menurut Sugiyono (2010:14) analisis kualitatif adalah sebagai berikut:
"Metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail".

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang turut ikut andil di lapangan dengan mencatat semua kejadian yang terjadi, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan laporan hasil penelitiannya.

Metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab.

2. Analisis Kuantitatif

Dikarenakan data yang ada berupa data yang akan diolah, maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:7) “Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”.

Semua data yang telah terkumpul melalui kuesioner masih memiliki skala ordinal, maka sebelum diolah data ordinal terlebih dahulu dikonversi menjadi data interval menggunakan *Methode Succesive Internal* (MSI). Proses pentransformasian data ordinal menjadi data interval dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu Microsoft Office Excel 2007 (*Analize*).

Penelitian yang akan diuji adalah pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, berhubung data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sampel, maka tidak dilakukan uji signifikan, jadi untuk menjawab hipotesis penelitian, koefisien regresi yang diperoleh langsung dibandingkan dengan nol, apabila nilai koefisien lebih besar atau lebih kecil dari nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien regresi sama dengan nol, maka Ho diterima. Metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Umi Narimawati (2008:5) mendefinisikan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:“Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval”.

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2}$$

Sumber : Sugiyono (2010)

Dimana:
Y = variabel terikat (kualitas laporan keuangan)
a = bilangan berkonstanta
b_1, b_2 = koefisien arah garis
X_1 = variabel bebas (akuntansi berbasis akrual)
X_2 = variabel bebas (sistem pengendalian intern)

2. Koefisien Korelasi

Menurut Sujana dalam Umi Narimawati (2010:49) pengujian korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel x dan y, dengan menggunakan pendekatan koefisien korelasi Pearson dengan rumus:

$$r = \frac{n(\sum X_i Y_i) - (\sum X_i)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum {X_i}^2) - (\sum X_i)^2\}\{n(\sum {Y_i}^2) - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Dimana : - 1 ≤ r ≤ + 1

R = Koefisien Korelasi

x = akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern (SPI)

y = kualitas laporan keuangan

n = Jumlah Responden

3. Koefisiensi Determinasi

Menurut Jonathan Sarwono (2006:72) koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnyan peranan atau pengaruh variable bebas (variable X) terhadap variable tergantung (variable Y). koefisien determinasi dihitung dengan cara mengkuadratkan hasil korelasi dikalikan dengan 100%.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Riduawan dan Sunarto (2007:81)

Keterangan :

KD = Koefisien determinasi

r^2 = Kuadrat dari korelasi ganda

IV. Hasil penelitian dan pembahasan

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk melihat pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, maka digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan

X_1 = Akuntansi berba

X_2 = Sistem pengend

β_0 = Konstanta

β_1, β_2 =Koefisien Regresi

Hasil pengolahan *software SPSS 13* untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.68
Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	2,341	5,516		,424	,674			
	Akuntansi Berbasis Akrual (X1)	,368	,147	,379	2,504	,018	,498	,416	,360
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	,192	,076	,381	2,518	,017	,500	,418	,362

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 2{,}341 + 0{,}368\ X_1 + 0{,}192\ X_2$$

Nilai koefisien regresi pada variabel-variabel bebasnya menggambarkan apabila diperkirakan variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan nilai variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat diperkirakan bisa naik atau bisa turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.

Dari persamaan regresi linier berganda diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 2,341. Artinya, jika variabel kualitas laporan keuangan (Y) tidak dipengaruhi oleh kedua variabel bebasnya (akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern bernilai nol), maka besarnya rata-rata kualitas laporan keuanganakan bernilai 2,341.

Tanda koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual (X_1) dengan kualitas laporan keuangan (Y). Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,368 mengandung arti untuk setiap peningkatan akuntansi berbasis akrual (X_1) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,368.

Koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian intern (X_2) dengan kualitas laporan keuangan (Y). Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,192 mengandung arti untuk setiap peningkatan sistem pengendalian intern (X_2) sebesar satu satuan akan menyebabkan meningkatnya kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,192.

Menguji Keberartian Koefisien Regresi

- **Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji F.

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

$\alpha = 5\%$

Statistik Uji:

$$F = \frac{R^2(n - k - 1)}{k\left(1 - R^2\right)}$$

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika F hitung < F tabel

2. Tolak Ho jika F hitung ≥ F tabel

F tabel = $F_{\alpha ; (df1, df2)}$; df1 = k , df2 = n-k-1

Hasil uji F berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.69
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	236,337	2	118,169	9,173	,001[a]
	Residual	386,481	30	12,883		
	Total	622,818	32			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern (X2), Akuntansi Berbasis Akrual (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 9,173. Karena nilai F hitung (9,173) > F tabel (3,316), maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian internsecara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

➢ **Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t.

Hipotesis :

- Ho1 : $\beta_1 = 0$ Tidak ada pengaruh yang signifikan dari akuntansi berbasis akrual (X_1) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
  Ha1 : $\beta_1 \neq 0$ Ada pengaruh yang signifikan dari akuntansi berbasis akrual (X_1) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
- Ho2 : $\beta_2 = 0$ Tidak ada pengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian intern (X_2) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
  Ha2 : $\beta_2 \neq 0$ Ada pengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian intern (X_2) secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

α = 5%

Statistik Uji :

$t_{hit} = \frac{b}{Se(b)}$, derajat bebas = n-k-1

Kriteria Uji : 1. Terima Ho jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel

2. Tolak Ho jika t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel

Hasil uji t berdasarkan pengolahan SPSS disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.70
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	2,341	5,516		,424	,674			
	Akuntansi Berbasis Akrual (X1)	,368	,147	,379	2,504	,018	,498	,416	,360
	Sistem Pengendalian Intern (X2)	,192	,076	,381	2,518	,017	,500	,418	,362

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Nilai t hitung variabel akuntansi berbasis akrual adalah 2,504. Karena t hitung (2,504) > t tabel (2,042) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi berbasis akrual (X_1) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
2. Nilai t hitung variabel sistem pengendalian intern adalah 2,518. Karena t hitung (2,518) > t tabel (2,042) maka Ho ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern (X_2) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh akuntansi berbasis akrual (X_1) dan sistem pengendalian intern (X_2) terhadapkualitas laporan keuangan (Y) dapat ditunjukkan oleh koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut :

KD = R^2 x 100%

= $(0,616)^2$ x 100%

= 37,9 %

Artinya, variabel akuntansi berbasis akrual (X_1) dan sistem pengendalian intern(X_2) memberikan pengaruh sebesar 37,9% terhadap kualitas laporan keuangan, angka tersebut termasuk dalam kategori rendah. sedangkan sisanya sebesar 62,1% kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh pengawasan, kareana pengawasan atau *control* terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (saiful anwar,2004). Pengawasan yang dilakukan juga terhadap standar akuntansi yang digunakan, di pemerintahan seharusnya menggunakan

standar akuntansi pemerintah. Karena SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusung dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Arif Ardi Kusumah,2010).

Pembahasan

Pengaruh akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan

Setelah melakukan penyebaran kuisioner pada pemerintah provinsi jawa barat, penulis dapat membahas tentang variabel yang telah diteliti. Akuntansi berbasis akrual adalah hal yang baru dalam pemerintahan. Akuntansi berbasis akrual yang sudah diolah menghasilkan jawaban responden dalam kategori baik, tetapi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini masih menggunakan akuntansi berbasi kas menuju akrual, akuntansi berbasis akrual ini memiliki kemempuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan dalam Abdul halim (2007:48), menyatakan :

"Basis akrual mampu menghasilkan informasi guna penyusunan laporan keuangan yaitu informasi mengenai kas dan entitas selain kas. Disamping itu, basis ini dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas".

Dalam pemerintahan penyajian laporan keuangan disajikan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Akuntansi berbasis akrual meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti menurut Ekrem kara, (2011) yaitu ada banyak manfaat menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Laporan keuangan telah menjadi lebih jelas, sebanding dan akurat. Seperti didalam bab 1, sampai saat ini masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Akuntansi berbasis akrual belum sepenuhnya diterapkan karena terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam hal akuntansi berbasis akrual, hal itu ditandai dengan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam melakukan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional belum terlalu paham. Hal ini dapat dikarenakan karena saat ini masih digunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual yang belum menggunakan laporan operasional. Dari hasil kuisioner juga dapat diketahui bahwa pemerintah sendiri masih kurang paham tentang kebijakan dan peraturan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Hal lain yang membuat akuntansi berbasis akrual belum diterapkannya juga karena belum memadainya sarana tekhnologi yaitu aplikasi yang digunakan di biro keuangan belum dapat menghasilkan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Dari hasil olah data kuisioner pun didapatkan koefisien regresi untuk variabel bebas X_1 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual (X_1) dengan kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini menunjukan harus segeranya diterapkan akuntansi berbasis akrual dipemerintah Provinsi Jawa Barat guna meningkatkan kualitas laporan keuangan agar dapat mendukung peraturan pemerintah yang sudah ada.

Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Setelah melakukan penyebaran kuisioner pada pemerintah provinsi jawa barat, penulis dapat membahas tentang variabel yang telah diteliti. Sistempengendalian intern adalah hal yang harus selalu dilakukan oleh pemerintah, khususnya dipemerintah Provinsi Jawa Barat, sisitem pengendaliana intern sudah diterapkan dengan baik, hal ini tercermin dalam data kuisioner yang telah diolah. Sistem pengendalian intern terbagi dalam lima bagian, yang setiap bagiannya harus saling berkesinambungan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan. hal ini sejalan dengan Mahmudi (2007: 27) yang menyatakan bahwa:

"Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di

dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Dari hasil olah datapun dinyatakan bahwa koefisien regresi untuk variabel bebas X_2 bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian intern (X_2) dengan kualitas laporan keuangan (Y). Walaupun dipemerintah provinsi jawa barat sistem pengendalian intern sudah baik, tetap harus ditingkatkan lagi bagian-bagian yang memiliki kelemahan, seperti dalam dijelaskan dalam kuisioner yaitu sistem pencatatn aset yang agak lemah, hal ini dapat menurunkan kuailitas laporan keuangan. maka daripada itu sistem pengendalian intern harus dijaga kualitasnya agar dapat mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini juga dinyatakan oleh Anindita Primastuti (2006), yaitu untuk memenuhi kriteria keandalan dan relevansi suatu laporan keuangan juga sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengendalian intern yang baik. Dan dengan sistem pengendalian intern yang berkualitas maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah bias terhindar dari penyelewengan , resiko salah prosedur, dan inefisiensi sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Seperti dalam bab 1, hal-hal yang menyebabkan sistem pengendalian intern kurang terkendalinya pencatatan dan pengendalian fisik atas aset. Dan kurangnya identifikasi resiko yang dilakukan pimpinan saat ada pengeluaran atau pendapatan yang tidak sesuai dengan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) sehingga dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dan pelaksanaan anggaran.

Pengaruh akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan

Seperti sudah dijelaskan bahwa secara parsial akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu pula secara simultan variabel akuntansi berbasis akrual (X_1) dan sistem pengendalian intern(X_2) memberikan pengaruh sebesar 37,9% terhadap kualitas laporan keuangan apabila dilaksanakan secara bersamaan. Dilihat dari besarnya pengaruh sebaiknya kedua variabel tersebut dilakukan dengan baik dan berbarengan demi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan maka pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan opini yang diperoleh oleh pemerintah atas laporan keuangan yang diaudit akan mendaptkan opini yang baik pula. Dengan laporan keuangan yang berkualitas pula dapat mendukung program pemerintah yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik. Seperti Menurut Mahmudi (2007: 27) menyatakan bahwa:
"Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah".

Sistem akuntansi pemerintah daerah yang baru sudah mengatur tentang akuntansi berbasis akrual ini. Dan juga menurut Purwaniati nugraheni (2006) laporan keuangan yang disajikan jika sudah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang andal artinya laporan keuangan telah memuat informasi yang disajikan secara jujur dan wajar. Dan dari hasil kuisioner yang telah disebar, akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern sama-sama memiliki kelemahan. Sejak tahun 2010 semestinya akuntansi berbasis akrual sudah mulai diterapkan tetapi di biro keuangan setda pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai sekarang masih menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Karena sistem akuntansi kas menuju akrual pun baru diterapkan maka saat terjadi perubahan menjadi sistem akuntansi berbasis akrual pemerintah provinsi sedikit tertinggal hal itu bisa terjadi karena SDM yang terkait merasa sulit dalam menyesuaikan sistem yang baru lagi. Serta sarana pun masih dirasakan cukup, seharusnya sarana penunjang dalam keadaan yang baik, karena sarana dalam membuat laporan keaungan berbasis akrual seharusnya mendukung seperti dapat menghasilkan laporan operasional, laporan laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan perubahan ekuitas. Sistem pengendalian intern pun masih ada yang kurang terkendali. Itu ditandai dengan

kurangnya pengendalian atas pencatatan aset. Dengan kurangnya pengendalian tersebut dapat menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan. Karena laporan keuangan menjadi kurang relevan, atautidak sesuai keadaan yang sebenarnya. Pengendalian merupakan kegiatan yang saling terkait satu sama lainnya. Dengan adanya pengendalian, dapat mengecek kembali tentang semua sitem dan prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yaitu, standar akuntansi pemerintah yang digunakan, prosedur pencatatan, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan kurang mendukungnya sarana yang ada maka dapat menyebakan penurunan kualitas laporan keuangan. sistem pengendalian intern yang terjadi pun masih kurang optimal sehingga pencatatan atas aset masih kurang terkendali, dengan kurang terkendalinya pencatatan aset tersebut dapat menyebabkan kurang relevannya sebuah laporan keuangan. dengan kurang relevannya sebuah laporan keaungan artinya laporan keuangan kurang berkualitas.

V. Simpulan dan saran

Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang dibuat penulis adalah :

1. Dari hasil penelitian, secara parsial disimpulkan bahwa akuntansi berbasi akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukan dengan koefisien regresi variabel bebas menunjukkan arah hubungan dari variabel yang bersangkutan dengan kualitas laporan keuangan. Koefisien regresi untuk variabel akuntansi berbasis akrual bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara akuntansi berbasis akrual dengan kualitas laporan keuangan .
2. Dari hasil penelitian, secara parsial disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan dengan Koefisien regresi untuk variabel bebas sistem pengenlian intern bernilai positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan.
3. Secara simultan atau bersama-sama, akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.Dari hasil koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan jika dijalankan secara bersamaan. Jadi, lebih baik akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern dijalankan bersamaan demi meningkatkan kualitas laporan keuangan

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam simpulan, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Sebaiknya Pemerintah Provinsi jawa barat segera menerapkan akuntansi berbasis akrual secar efektif, demi mendukung peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berdasarkan basis akrual telah dibuat. Diharapkan juga setiap sumber daya manusia yang ada terlebih yang berkerja dibiro keuangan setda yang memiliki tugas untuk membuat laporan keuangan diberikan pengetahuan yang cukup agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. karena dianggap bahwa akuntansi berbasis akrual lebih efektif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Dan setiap pegawai yang mengerti dapat berspbagi ilmunya kepada pegawai lain yg belum mengerti.
2. Sebaiknya sistem pengendalian intern yang ada dipemerintah provinsi jawa barat lebih ditingkatkan dibagian pengendalian atas fisik dan pencatatan asset dan dalam identifikasi resiko yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara mendadak. Agar dapat mendukung meningkatkan kualitas laporan keuangan. Instansi terkait juga

diharapkan tetap menjaga hubungan kerja yang baik. Aparat pengawas intern pemerintah juga harus meningkatkan fungsinya. Karena dengan hubungan kerja yang baik maka setiap fungsi dalam mengerjakkan tugasnya masing-masing dengan baik dan efektif. Setiap bagian-bagian yang terkadung dalam sistem pengendalian intern juga harus dilakukan secara berkala. Dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan. Dibuat perpustakaan, agar pegawai dapat mencari tahu, bgaimana SPI yang baik, agar bisa menerapkannya.

3. Laporan keuangan pemerintah provinsi jawa barat lebih ditingkatkan dengan cara menjalankan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern secara bersamaan, karena menurut hasil penelitian jika kedua hal ini dijalankan secara bersamaan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual dan sistem pengendalian intern yang optimal tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, maka dari itu pemerintah harus meningkatkan kemampuan yang dimiliki dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan dan pemerintah juga harus mendukung sarana-prasana yang tersedia agar dapat memudahkan setiap pekerjaan pegai demi meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dibuat setiap periodenya. Karena laporan keuangan yang berkualitas akan mendukung terwujudnya *good governance.* Dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan, agar pegawai lebih kompeten.

Vi. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hafiz Tanjung.2012.*Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*.Bandung: Alfabeta

Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi 3. Salemba 4

Binsar H. Simanjuntak. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Di Sektor Pemerintahan Di Indonesia.*Jakarta : Kongres Xi Ikatan Akuntansi Indonesia

Husein Umar. 2005.*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta :Graha Ilmu

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP STIM YKPN

Mulyadi. 2003. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.

Nunuy Nur, Arfiyah. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Jakarta: Kencana

Riduan & Engkosahmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan Dan Memakia Analisis Jalur.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta

Tim Fokus Media, 2009, *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),* Fokus media

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media

Umi,Narimawati Dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi Dan Tugas Akhir.* Jakarta: Penerbit Genesis

Peraturan-peraturan :
Peraturan mentri dalam negri No. 60 tahun 2008, tentang sistem pengendalian intern

Peraturan mentri dalam negri No. 4 Tahun 2008, tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan daerah

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

http://www.pekalongankab.go.id
http://www.lensaindonesia.com
http://bandung.bpk.go.id
http://akuntanonline.com
http://www.iaiglobal.or.id
http://bisnis.news.viva.co.id
http://ruslan.web.id/category-pengendalian-intern/157-kelemahan-sistem-pengendalian-intern-pada-pemda
http://www.pikiran-rakyat.com/node/120690
http://www.bpk.go.id/web/?p=5846